Jurnal Hubungan Internasional
Indonesia

Strategi AIPAC (*America-Israel Public Affairs Committee)* dalam Kebijakan AS: Abraham Accords

Silvia Dwi Hartina[1], Y. A. Wahyuddin[2], Mahmuludin[3]

[1]Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Mataram, Indonesia, silviadwihartina48@gmail.com
[2]Dosen Hubungan Internasional, Universitas Mataram, Indonesia, aria_wahyuddin@unram.ac.id
[3]Dosen Hubungan Internasional, Universitas Mataram, Indonesia, mahmuludin@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana strategi yang dilakukan oleh kelompok kepentingan AIPAC dalam upayanya untuk memengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap pengesahan Abraham Accords. Permasalahan utama pada penelitian ini adalah bagaimana AIPAC mampu menjadikan posisinya yang strategis dalam mendorong perumusan kebijakan luar negeri Amerika.. Penelitian ini menggunakan teori kelompok kepentingan menurut Gabriel Almond yang melihat bagaimana sebuah kelompok kepentingan sebagai bagian dari struktur politik yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada para pemangku kebijakan. Metode penelitian pada penulisan ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber primer dan sekunder berupa studi pustaka. Hasil dari penelitian ini mencakup tiga strategi utama: (1) melakukan lobi kepada para pemangku kebijakan seperti kongres dan eksekutif pemerintahan Amerika; (2) membentuk opini publik melalui media; dan (3) bekerja sama dengan kelompok kepentingan lain yaitu kelompok kristen evangelist. Penelitian ini melihat bahwa dalam pengesahan Abraham Accords, strategi tersebut berhasil dengan bertumpu pada kekuatan lobi, pengaruh opini publik melalui media, dan kemampuan mengintegrasikan kelompok-kelompok kepentingan.

Kata Kunci: AIPAC, Abraham Accords, Amerika Serikat, Israel, Zionisme, Kristen Evangelist.

Abstract

This research aims to explain the strategies employed by the AIPAC interest group in its efforts to influence U.S. foreign policy regarding the ratification of the Abraham Accords. The main issue in this study is how AIPAC has been able to leverage its strategic position to promote the formulation of U.S. foreign policy. This research uses the interest group theory according to Gabriel Almond, to analyze how an interest group functions as part of the political structure to convey the aspirations of society to policymakers. The research method in this writing is a descriptive qualitative method using primary and secondary sources in the form of literature study. The results of this research consist of three main strategies: (1) lobbying policymakers such as Congress and the American executive; (2) shaping public opinion through the media; and (3) collaborating with other interest groups, namely the evangelical Christian group. This research observes that in the ratification of the Abraham Accords, the strategy was successful by relying on the power of lobbying, the influence of public opinion through the media, and the ability to integrate interest groups.

Keywords: AIPAC, Abraham Accords, United State of America, Israel, Zionism, Evangelical Christianity.

Pendahuluan

America-Israel Public Affairs Committe (AIPAC) muncul sebagai sebuah gerakan yang berbasis lobi untuk membantu Israel pada konflik yang melibatkan negara tersebut. Dalam perkembangannya, AIPAC memiliki anggota dengan latar belakang Yahudi Ashkenazi yang merujuk pada wilayah-wilayah di Eropa. Ashkenazi sendiri dalam Alkitab Ibrani (Tanakh) memiliki artian sebagai nama dari salah satu keturunan Yafet, putra Nuh yang dipercaya telah menetap di wilayah Eropa Utara (Rossinow, 2018). Di abad pertengahan, rabi (pemimpin agama) Yahudi dan penstudi kemudian mengidentifikasi wilayah Jerman dan Eropa Tengah sebagai 'Ashkenaz'. Diaspora Yahudi Ashkenazi kemudian melakukan perpindahan ke berbagai negara, salah satunya ke wilayah Timur Tengah (Dowty, 2014).

Perpindahan kelompok Yahudi ke wilayah Timur Tengah dapat dikatakan menambah isu baru dengan belum terselesaikannya beberapa isu yang sudah ada seperti konflik geopolitik, sengketa wilayah secara historis, dan perbedaan keyakinan yang pada saat itu sedang mengalami eskalasi (Dowty, 2014). Melihat begitu banyak korban dari konflik yang terjadi dan bagaimana diskriminasi yang diterima masih saja terjadi, membuat orang-orang dengan latar belakang Yahudi Ashkenazi-Amerika pada akhirnya membentuk sebuah lobi yang berorientasi pada bidang sosial-politik yang disebut *America-Israel Public Affairs Committee* (AIPAC) oleh beberapa tokoh pendiri seperti Isaiah L. Kenen, Abba Eban, dan Rockeffeler berdasarkan konsensus anggota setelah mengalami beberapa perubahan nama akibat perbedaan pandangan mengenai konsep dari zionisme (Ummah, 2019).

Zionisme merupakan sebuah gerakan politik dan ideologi yang dikembangkan oleh Theodor Herzl di abad ke-19 sebagai sebuah tanggapan akan meningkatnya anti-semitisme di Eropa dan keinginan sebagian besar masyarakat Yahudi untuk memiliki tanah air sendiri (Hasyim, 2019). Anti-semitisme secara sederhana pada awalnya adalah bentuk diskriminasi terhadap orang Yahudi sebagai kelompok agama, etnis, kebangsaan, atau ras. Gerakan ini telah masif dilakukan dalam berbagai bentuk sepanjang sejarah, terutama diskriminasi sosial dan ekonomi di Eropa di abad pertengahan dengan kebijakan negara yang dibentuk secara sistematis untuk membenci kaum Yahudi (Kharismawati, 2009). Kendati demikian, semit merupakan istilah yang merujuk untuk kebudayaan, bahasa, atau kelompok yang masuk dalam rumpun "semit" yang berasal dari nama Sem (Shem), salah satu putra Nabi Nuh dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam untuk menggambarkan Bangsa Yahudi, Bangsa Arab, Lebanon kuno, maupun Etiopia. Namun, secara akademik dan politis, istilah ini kemudian lebih khusus merujuk pada diskriminasi terhadap kelompok Yahudi karena dianggap sebagai kelompok pembawa bencana dan maraknya tuduhan dari Gereja Katolik dan Protestan bahwa mereka adalah pembunuh Kristus (Rise, 2020).

Transisi hubungan antara negara-negara Barat dengan orang yang memiliki latar belakang Yahudi tidak terlepas dari faktor historis, politik, dan sosial. Sebelum perang dunia II, anti-semitisme begitu kuat di negara-negara Eropa dan Amerika. Kesadaran moral setelah peristiwa Holocaust menjadi titik balik dalam sikap negara-negara Barat terhadap kelompok Yahudi (Hitchcock, 2024). Pengakuan terhadap negara Israel kemudian menjadi simbol dukungan Amerika Serikat dan sebagian besar negara Eropa dan bagaimana perubahan hubungan kemanusiaan yang terjadi antara kelompok Yahudi dengan negara-negara Barat. Dengan melihat transformasi yang terjalin, perlu adanya dukungan yang nyata untuk membantu Israel pada isu-isu yang melibatkan negara tersebut dengan memberikan bantuan yang memiliki dampak cukup signifikan. Dimana hal ini kemudian dimanifestasikan melalui pembentukan AIPAC (Rossinow, 2018).

Strategi AIPAC memiliki dampak cukup masif dalam mengakomodir kepentingannya dengan masuk ke dalam sistem pemilihan umum di Amerika yang membuat kebijakan luar negeri maupun keberpihakan Amerika pada akhirnya dapat menguntungkan Israel dimana pengaruh yang signifikan dapat dilihat ketika

AIPAC berperan penting pada pemilihan presiden. Sepak terjang AIPAC cukup krusial dalam pembentukan kebijakan luar negeri Amerika dalam setiap perubahan rezim yang terjadi. AIPAC berusaha menggunakan taktik yang kuat agar dapat memengaruhi anggota kongres dan pejabat pemerintah, termasuk berada dalam lingkaran para pemangku kepentingan, dimana salah satunya adalah dengan menyebarkan dokumen-dokumen kebijakan yang telah ditetapkan tujuannya kepada para legislatif (Busheva, 2019).

Sebuah perjanjian di masa pemerintahan akhir Donald Trump pada 13 Agustus tahun 2020 dan diresmikan pada tanggal 15 September yang berkaitan erat dengan kepentingan AIPAC kemudian muncul yang bernama Abraham Accords. Abraham Accords merupakan perjanjian yang digunakan sebagai sebuah kesepakatan perdamaian yang disetujui oleh beberapa negara-negara Arab seperti Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Moroko untuk menormalisasikan hubungan luar negeri dengan satu-satunya negara Yahudi di Kawasan Timur Tengah yaitu Israel (Vakil & Quilliam, 2023). Konsep untuk menormalisasi hubungan diplomatik antara Israel dengan negara-negara Arab bukan termasuk dalam isu yang baru. Terdapat perjanjianperjanjian yang telah diinisiasikan sebagai jembatan perdamaian. Perjanjian Camp David dapat menjadi acuan awal dari rencana perdamaian, dimana perjanjian ini meupakan hasil dari negosiasi antara Israel dengan Mesir dan Amerika sebagai mediator di masa kepemimpinan Jimmy Carter tahun 1978 (AIPAC, n.d.). Kemudian di tahun 1991, Konferensi Madrid diadakan, yang merupakan upaya dunia internasional untuk memulai proses perdamaian antara Israel dengan negara-negara Arab yang disponsori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun tidak ada hasil yang pasti dari perjanjian ini, yang pada akhirnya hanya mampu menjadi jembatan dialog lebih lanjut pada Oslo Accords. Oslo Accords merupakan perjanjian yang berisikan serangkaian kesepakatan antara Israel dan Palestine Liberation Organization (PLO) yang ditandatangani pada tahun 1993 mengenai langkah penting menuju solusi dua negara, namun dalam rangkaian Oslo Accords 1-3, implementasi akhir yang belum menghasilkan konsensus yang mewujudkan tujuan perjanjian ini dibuat (Jabareen, 2013).

Abraham Accords menjadi sebuah langkah penting dalam sejarah hubungan internasional terutama di Kawasan Timur Tengah. Perjanjian ini awalnya diinisiasikan dengan harapan dapat menjadi jembatan untuk menyelesaikan isu yang terjadi antara Israel-Palestina dengan menciptakan kondisi untuk menormalisasi hubungan antara Israel dengan negara-negara Arab (Yossef, 2021). Kendati perjanjian ini sempat membuat UEA skeptis, namun dengan eskalasi konflik yang terjadi di Timur Tengah, hal ini membuat UEA mengurangi keteguhan dari ideologi yang dimiliki dengan menyetujui Abraham Accords sebagai langkah politik yang dirasa lebih terlihat pragmatis (Myrvold, 2022). Di masa kepemimpinan Donald Trump periode 2017-2021, Partai Republik tetap dengan komitmennya dalam hal kebijakan luar negeri untuk mendukung Israel pada isu-isu yang melibatkan negara tersebut. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana Trump berada di bawah kendali ideologi konservatif partai Republik yang diisi oleh tidak sedikit dari anggota AIPAC dengan membuat sebuah gagasan yang disebut “Judeo-Christian Values” (nilai-nilai Yudaisme-Kristen) sebagai landasan dari sebuah pendekatan sosial dan kebijakan politik tertentu yang dimanifestasikan dalam Abraham Accords (Egel et al., 2021).

Dalam melihat komitmen yang diberikan oleh Amerika kepada Israel, dapat dilihat bahwa adanya keterlibatan kelompok AIPAC dalam proses dukungan terhadap terbentuknya perjanjian Abraham Accords. Lobi AIPAC memastikan bahwa Amerika Serikat secara penuh memberi dukungan terhadap Israel dalam situasi konflik apapun. Keterlibatan ini dapat dilihat dari beberapa kasus pada masa pemerintahan Presiden-presiden sebelumnya (Zanotti, 2015). AIPAC memberikan pengaruh cukup signifikan pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Strategi yang dilakukan sangat berkaitan dengan kerentanan dan integratif yang dimiliki oleh sistem politik Amerika terhadap tekanan agama dan etnis (Ben-David, n.d.).

Sebuah situs web bernama Track AIPAC memberikan kritik kepada AIPAC dengan mengungkapkan bahwa terdapat jejak finansial yang diberikan oleh AIPAC dalam jumlah yang masif kepada senator di negara-negara bagian Amerika Serikat. Track AIPAC mengumpulkan nama-nama pemangku kepentingan di bagian legislatif dan pejabat publik yang menerima sekian jumlah uang sebagai salah satu bagian dari teknik 'lobbying' yang dilakukan. Bentuk dukungan lain yang juga digunakan adalah 'endorsement' atau dukungan kepada calon legislator atau senator yang sekiranya mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan Israel dalam pembuatan kebijakan luar negeri (Track AIPAC, n.d.).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dalam menaruh peran pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat, AIPAC tidak hanya menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah lobi selama masa kampanye pemilu, namun juga berperan aktif untuk mendorong para pemangku kebijakan untuk mengakomodir kepentingan Israel, terutama di Timur Tengah. Hal ini kemudian membuat sebuah pertanyaan muncul mengenai bagaimana bentuk strategi yang dilakukan oleh AIPAC dalam memengaruhi kebijakan luar negeri Amerika melalui perjanjian Abraham Accords?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk mengkaji kontribusi dan perbedaan dari penelitian terdahulu, serta sebagai dasar analisis terhadap pengaruh AIPAC dalam kebijakan luar negeri AS, khususnya pada masa pemerintahan Donald Trump dan perjanjian Abraham Accords. Sumber data yang digunakan terdiri dari buku, jurnal, situs daring, serta data primer dari laman resmi AIPAC. Data dianalisis secara deskriptif untuk menemukan pola dan relevansi terhadap topik. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Almeida & Rosero, 2021), analisis data dilakukan dengan mengumpulkan, memilah, menyusun, dan menyimpulkan informasi untuk mendukung proses penelitian. Penelitian ini dibatasi pada periode 2017–2020, ketika Trump, sejak masa kampanye, menyatakan dukungan terhadap Israel, termasuk pemindahan kedutaan ke Yerusalem dan mendorong normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan negara-negara Arab.

Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini, penulis akan menjabarkan mengenai hasil temuan dari beberapa sumber yang diharapkan dapat mendukung penelitian penulis. Hasil temuan tersebut kemudian penulis analisis menggunakan kerangka teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu dengan menggunakan teori Kelompok Kepentingan yang dikemukakan oleh Gabriel Almond. Penulis berharap hasil dan pembahasan yang dijabarkan secara terstruktur dan rinci dapat menjawab rumusan masalah melalui penelitian yang cukup mendalam pada penulisan ini.

a. Kelompok Kepentingan dan AIPAC

Dalam melihat suatu isu, perlu adanya teori yang digunakan, sehingga dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Gabriel Almond. Gabriel Almond melihat kelompok kepentingan sebagai sebuah kelompok yang memiliki peran untuk memengaruhi suatu kebijakan pemerintah dengan tujuan mencapai kepentingan yang dimiliki tanpa mengharapkan imbalan untuk memperoleh suatu posisi dalam kursi pemerintahan atau jabatan publik (Almond, 1958). Teori ini cukup relevan dalam menganalisis suatu isu, terlebih isu-isu kontemporer sebab mampu menjelaskan dinamika interaksi yang terjadi antara masyarakat sipil dan pemerintah dalam perannya untuk menjembatani kepentingan kelompok-kelompok dalam membentuk suatu kebijakan publik (Maiwan, 2016).

Almond mendefinisikan teori ini dalam beberapa kategori berdasarkan dinamika yang muncul serta kemana arah tujuan suatu kelompok ditujukan. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa bagian diantaranya:

- **Kelompok Anomik (Anomic Groups):** Kategori ini menempatkan kelompok yang memiliki sifat atau bertindak secara spontan sebagai reaksi terhadap situasi tertentu. Kelompok ini biasanya tidak memiliki struktur kepengurusan yang formal dan biasanya hanya terdiri dari beberapa individu yang tergerak karena sebuah isu yang meresahkannya atau ketidakpuasan akan kebijakan yang dibentuk oleh para pemangku kepentingan. Kelompok ini biasanya memiliki kemampuan komunikasi yang cukup rendah dalam konteks komunikasi politik. Setelah aspirasi sudah didengar, biasanya kelompok ini akan bubar.
- **Kelompok Non-Assosiasional (Non-Associational Groups):** Kelompok ini hadir dengan pengorganisasian yang cukup longgar dan isu yang diangkat cukup spesifik. Kelompok ini biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan keturunan, etnis, keyakinan, status, atau kelas sosial. Tujuan kelompok ini biasanya menyuarakan ketimpangan yang kelompok mereka hadapi dalam tatanan sosial.
- **Kelompok Institusional (Institutional Groups):** Kelompok ini dibentuk dalam struktur yang lebih formal. Kegiatan yang dilakukan biasanya telah disusun dengan rentang waktu yang juga telah ditentukan. Kelompok ini bisanya memiliki sistem yang cukup fungsional di bidang sosial dan politik yang luas.
- **Kelompok Asosiasional (Associational Groups):** Kelompok ini terdiri dari individu-individu yang terbentuk secara resmi dan terorganisir dengan tujuan memengaruhi kebijakan publik. Karakteristik kategori kelompok ini biasanya memiliki tujuan yang spesifik dan seringkali menggunakan tenaga profesional dalam merumuskan suatu strategi advokasi dan kebijakan.

Asumsi dasar dari teori ini terdiri dari beberapa bagian yang mampu menjadi sokongan paling fundamental untuk mengkaji suatu isu (Almond, 1958). Hal ini dapat dilihat dalam tiga pokok yang muncul dari teori kelompok kepentingan, diantaranya:

1. Pluralisme: Almond secara tegas menyatakan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki satu kelompok namun terdiri dari berbagai bentuk kelompok dengan tujuan atau kepentingan yang sama beragamnya, dimana keberagaman ini menjadi ciri khusus dari sebuah sistem politik yang sehat.
2. Hubungan Kepentingan dan Peran Kelompok: Kelompok-kelompok kepentingan memiliki fungsi sebagai jembatan bagi individu atau kelompok terkait untuk menyampaikan aspirasi atau kebutuhan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah atau pemangku kebijakan.
3. Pengaruh terhadap Kebijakan Publik: Kelompok kepentingan berpotensi dapat memengaruhi proses pembentukan sebuah kebijakan atau keputusan melalui berbagai cara yang bisa dilakukan seperti lobi, bantuan dalam kampanye pemilu, maupun adanya partisipasi di kursi legislatif

Penulis menggunakan teori ini untuk melihat bagaimana AIPAC berperan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat melalui perjanjian Abraham Accords. Melihat dari keterlibatan yang ada, AIPAC dapat dikatakan masuk dalam kategori kelompok asosiasional sebab keanggotaan yang ada dilakukan secara terorganisir dan aktif dalam kegiatan ‘lobbying’. Kelompok asosiasional memiliki peran penting dalam sistem politik dengan mampu untuk memengaruhi kebijakan publik. AIPAC dapat dikatakan memiliki struktur organisasi yang formal. Artikulasi kepentingan AIPAC berfungsi sebagai sebuah jembatan antara masyarakat dengan latar belakang Yahudi dalam menyampaikan aspirasi serta kepentingan kepada para pemangku kebijakan. Selain itu, AIPAC juga berperan aktif dalam melakukan kegiatan advokasi untuk memberikan edukasi kepada publik terkait isu-isu Israel baik itu melalui seminar, publikasi melalui beberapa medium, maupun kampanye jelang ajang pemilu melalui strategi yang dikatakan mampu mendobrak batas pengetahuan masyarakat awam.

Teori ini mampu menjadi pisau analisis untuk mengkaji bagaimana peran AIPAC sebagai kelompok kepentingan yang masuk dalam kategori kelompok kepentingan Assosiasional menurut Almond. Hal ini dapat dilihat pada salah satu artikel jurnal yang juga membahas bagaimana AIPAC termasuk pada kategori ini sebab kelompok Assosiasional cenderung memiliki berbagai taktik dan proses mengorganisir. Kelompok ini juga dapat dikatakan memiliki pengaruh besar pada pemangku kepentingan, perusahaan-perusahaan yang pemiliknya adalah seorang Yahudi, anggota kongres, bahkan mampu memengaruhi keputusan presiden untuk mewujudkan kepentingankepentingan yang ingin dicapai (Maiwan, 2016).

b. Sejarah dan Pengaruh AIPAC dalam Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Dalam melihat lebih dalam terkait gerakan lobi AIPAC, perlu diketahui akar dari perkembangan gerakan berbasis Yahudi yang muncul dengan alasan yang cukup krusial. Semitisme menjadi kata pertama yang harus dipahami untuk mengetahui lebih lanjut terkait zionisme. Gerakan ini kemudian membentuk dasar dari pembentukan kelompok-kelompok pro-Israel yang cukup besar pengaruhnya, terutama AIPAC.

Semit merupakan istilah lama namun mulai popular dikenal di abad ke-19, dimana pada umumnya menggambarkan kelompok masyarakat yang berbahasa semit, yang rumpunnya mencakup bahasa Arab, Ibrani (Hebrew), Amharik, Aram, dan Tigrinya. Istilah ini kemudian diartikan sebagai sebutan untuk etnis dengan ciriciri masyarakat yang berada di Kawasan Timur Tengah (george vajda, 2025). Namun, seiring berkembangnya zaman, terjadi pergeseran makna yang membuat istilah ini menjadi sedikit berubah. Orang-orang Eropa menggunakan semitisme untuk menyebut orang-orang keturunan yahudi, sehingga anti-semitisme dikatakan sebagai bentuk diskriminasi dan prasangka terhadap orang-orang Yahudi dalam berbagai bentuk sosial, politik, maupun ekonomi (Pauley, 2011). Anti-semitisme telah terjadi dalam kurun waktu yang begitu lama. Sejak zaman kuno, kelompok Yahudi dianggap sebagai kelompok berbeda karena praktek keagamaan dan sosial yang dilakukan. Di abad kekaisaran Romawi, kelompok Yahudi dianiaya setelah terjadi pemberontakan melawan Roma pada abad pertama Masehi yang pada saat itu berhasil menghancurkan Bait Suci di Yerusalem pada tahun 70 M (Feldman, 2018). Di abad pertengahan, kelompok Yahudi sering dijadikan kambing hitam atas berbagai bencana atau kejadian buruk yang terjadi, seperti bagaimana kelompok Yahudi dianggap sebagai alasan utama dengan adanya wabah penyakit Black Death pada abad ke-14. Di Eropa, terdapat kebijakan segregasi (pemisahan) kelompok Yahudi, dimana mereka dipaksa untuk menetap di kawasan yang disebut ghetto dan dilarang untuk memiliki tanah atau menjalankan suatu profesi yang penting (Feldman, 2018).

Di abad modern, anti-semitisme bertransformasi dari sekadar kebencian hanya karena agama, menjadi sebuah ideologi politik dan berbasis rasial. Pada abad ke-19, kelompok Yahudi dianggap sebagai ancaman terhadap identitas di setiap negara di Eropa. Munculnya konspirasi bahwa kelompok Yahudi akan mendominasi dalam bidang keuangan dan media menambah bahan bakar untuk melakukan diskriminasi terhadap mereka (Pauley, 2011). Puncak dari anti-semitisme ini kemudian meledak dengan kebangkitan Nazi di Jerman. Pada masa pemerintahan Adolf Hitler, anti-semitisme di Jerman mengarah pada peristiwa holocaust, yaitu genosida terhadap kelompok Yahudi yang memakan sekitar 6 juta orang selama Perang Dunia II berlangsung Pasca peristiwa holocaust, dunia mulai melihat bahwa anti-semitisme perlu dihapuskan dengan mulai melindungi hak-hak kelompok Yahudi dan mendorong untuk menempatkan kelompok tersebut ke wilayah yang aman, yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya gerakan zionisme (Hasyim, 2019).

Zionisme diambil dari kata zion yang merupakan sebuah nama salah satu gunung yang berada di tenggara Yerusalem. Berdasarkan kepercayaan orangorang Yahudi, puncak gunung tersebut pernah menjadi tempat upacara ritual keagamaan, dimana mereka juga meyakini bahwa Nabi Daud A.S.

dimakamkan di tempat tersebut. Konklusi yang muncul kemudian, zionisme diartikan sebagai ‘gerakan pengembalian orang-orang Yahudi di seluruh dunia ke Yerusalem’ (Hasyim, 2019). Gerakan zionisme di Amerika Serikat kemudian menjadi salah satu gerakan yang mendukung Israel sebagai sebuah negara di Kawasan Timur Tengah. Zionisme kemudian menjadi salah satu gerakan yang mendukung tindakan yang dilakukan AIPAC dalam mencapai tujuannya untuk selalu membantu Israel pada konflikkonflik yang melibatkan negara tersebut (Sehar, n.d.).

Dalam upaya untuk mempertahankan eksistensi Israel sebagai sebuah negara, perlu ada bantuan masif dari berbagai aspek sosial yang harus dipenuhi. AIPAC kemudian masuk untuk memenuhi peran-peran tersebut. AIPAC merupakan kelompok kepentingan yang dibentuk oleh Isaiah L. Kenen, seorang jurnalis asal Kanada di tahun 1949 (Rossinow, 2018). Pada awalnya, AIPAC bernama The American Zionist Council (AZC) yang kemudian berubah menjadi The American Zionist Committe for Public Affairs (AZCPA) di tahun 1951. Namun, pada akhirnya konsensus untuk nama akhirnya terjadi dengan AIPAC yang digunakan sebagai nama resmi dari kelompok tersebut (Sehar, n.d.).

Dalam konteks politik luar negeri Amerika, AIPAC terlibat cukup besar pada isu-isu di Timur Tengah. AIPAC sering terlibat untuk melakukan lobi pada kongres apabila Israel terlihat tidak diuntungkan dalam keputusan yang dibentuk (Gultom & Miftah, 2024).

c. Pengaruh AIPAC terhadap Keputusan Politik Kongres Amerika Serikat

Dukungan terhadap zionisme mendorong terbentuknya World Zionist Organization (WZO) pada 1897, yang bertujuan mendirikan tanah air bagi Yahudi di Palestina (Rossinow, 2018). Di AS, gerakan ini berkembang melalui Federation of American Zionist yang kemudian menjadi Zionist Organization of America (ZOA), meskipun pengaruh politiknya saat itu masih terbatas (Cutter, 2019). Dukungan Presiden Wilson terhadap Deklarasi Balfour (1917) memperkuat posisi zionisme, diikuti oleh pengesahan Resolusi Lodge-Fish oleh Kongres AS (Shlaim, 2009; Yarden, n.d.).

Setelah Perang Dunia II, lobi Yahudi di AS makin aktif, terutama dalam mendesak Presiden Truman untuk mendukung pendirian negara Israel. Inggris akhirnya mengakhiri mandatnya di Palestina, dan Israel memproklamasikan kemerdekaannya pada 14 Mei 1948, dengan AS sebagai negara pertama yang mengakuinya (Shlaim, 2009). Sejak saat itu, AIPAC mengambil peran penting dalam memengaruhi kebijakan luar negeri AS demi kepentingan Israel (Busheva, 2019). Untuk menjalankan misinya, AIPAC membutuhkan pendanaan besar yang didukung oleh donatur Yahudi kaya yang merasa memiliki ikatan historis dan emosional terhadap Israel dan tragedi Holocaust (Youvan, 2024; Donald Shaw, 2024). AIPAC juga didukung oleh The American Israel Education Foundation (AIEF), yang sejak 1988 secara konsisten mendanai program pendidikan, seminar Timur Tengah, dan perjalanan ke Israel bagi para politisi AS (aiefdn, n.d.).

AIPAC secara resmi menjadi sebuah lobi domestik di Amerika yang sumber pendanaannya berasal dari donasi, bukan dari pemerintah Israel atau pemerintah Amerika sendiri yang membuat AIPAC diterima. Kendati demikian, tujuan utama yang ingin dicapai adalah untuk menyokong kepentingan Israel (Meriem Dalila, 2022). Dalam upayanya, AIPAC menyatakan bahwa kerja sama yang terjadi antara Amerika dengan Israel dapat menguntungkan kedua negara dalam berbagai aspek. Oleh sebab itu, AIPAC melakukan lobi pada kongres untuk mendukung Israel dalam beberapa skema seperti bantuan luar negeri, kerja sama state to state, dukungan terhadap anti-terorisme, dan menyelesaikan permasalahan terkait isu antara Israel-Palestina dalam konflik geopolitik di Timur Tengah (Firdaus, 2023). Untuk mempertahankan kerja sama antara Amerika-Israel, AIPAC perlu melakukan lobi kepada kongres dengan harapan, bantuan yang diberikan tidak hanya sebatas bantuan keamanan, namun juga keputusan-keputusan pemerintah Amerika yang dapat membantu Israel dalam aspek lainnya. AIPAC kemudian memproduksi berita melalui koran,

bahkan sampai pada tahap memiliki dampak yang besar yaitu terbentuknya *The Near East Report* (Near East Report, n.d.). Melalui laman pelaporan ini, AIPAC menargetkan orang-orang yang melihatnya adalah bagian dari anggota AIPAC, para kongres, senator, maupun istana putih yang membuat kebijakan mengenai hubungan diplomatis antara Amerika-Israel, kebijakan luar negeri Amerika, dan isu geopolitik di Kawasan Timur Tengah.

Pengaruh dari AIPAC lalu dapat dilihat melalui seberapa besar tindakantindakan yang telah dilakukan, terutama saat melakukan lobi terhadap para kongres. Setiap tahun, AIPAC akan mengumpulkan tujuan-tujuan dalam bentuk daftar yang harus dicapai, kemudian mengirimkannya kepada para anggota kongres dan istana putih. Hal ini memiliki dampak cukup signifikan, seperti bantuan militer, upaya untuk menghentikan penjualan senjata ke negara-negara Arab di masa pemerintahan Ronald Reagen, upaya pemindahan Kedutaan Besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem, dan menghentikan tindakan-tindakan Anti-Semitisme (Austin, 2015).

d. Perjanjian Abraham Accords dalam Konteks Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

Sebagai negara yang ingin mempertahankan tujuannya untuk selalu memihak Israel setelah kemerdekaan telah dideklarasikan, Amerika tentu akan berada di barisan terdepan untuk mendukung keputusan-keputusan yang dapat memberikan keuntungan bagi Israel (Rynhold, 2021). Hal inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bantuan dari Amerika untuk menjadi pihak yang membantu Israel dalam proses menormalisasi hubungan antara Israel dengan negara-negara Arab (Rynhold, 2021). Upaya untuk menormalisasikan hubungan diplomatis antara Israel dengan negara-negara Arab sudah bukan menjadi topik baru. Sebagai satu-satunya negara dengan mayoritas penduduk Yahudi di Kawasan Timur Tengah, Israel perlu memiliki hubungan baik yang mampu mendukungnya dalam aspek-aspek penting untuk membuat negaranya kuat dan jauh dari ancaman konflik yang berpotensi mengalami eskalasi (Quandt, 1986). Normalisasi hubungan diplomatis kemudian menjadi produk di meja untuk dijadikan sebagai manifestasi dari tujuan ini. Dengan harapan untuk dapat mewujudkan upaya normalisasi antara Israel dengan negara-negara Arab, perlu adanya perjanjian yang mampu menjadi jembatan untuk menyatukan tujuan kedua belah pihak. Oleh sebab itu, Amerika telah melakukan beberapa pertemuan untuk mewujudkan hal tersebut dengan menjadi pihak tengah dalam isu ini (Quandt, 1986).

Perjanjian-perjanjian Sebelum Pengesahan Abraham Accords

Terdapat begitu banyak perjanjian-perjanjian yang telah dilaksanakan untuk membuat bagaimana Israel dapat memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara di Kawasan Timur Tengah. Isu utama yang selalu dibawa untuk diselesaikan selain hubungan normalisasi juga tentunya adalah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara Palestina-Israel (Kardo Karim Rached Mohammad & Ahmad Omar Bali, 2017). Hal ini kemudian dapat dilihat dari lini masa di bawah. Kendati terdapat sedikit perbedaan dari substansi pertemuan, namun maksud dari perjanjian ini memiliki kesamaan untuk membantu Israel mempertahankan eksistensinya di Timur Tengah.

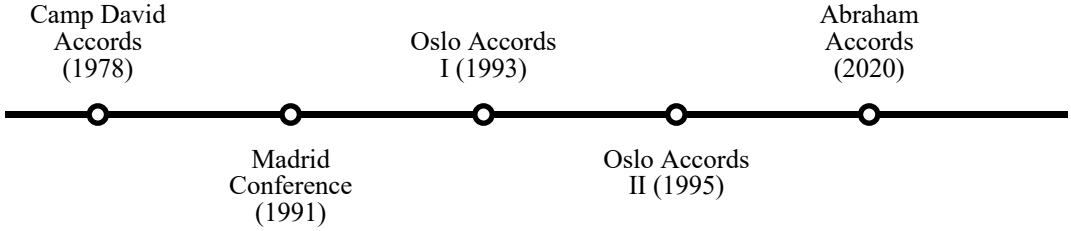

Perjanjian Camp David (1978) antara Israel dan Mesir merupakan langkah awal normalisasi diplomatik di Timur Tengah, dengan Presiden AS Jimmy Carter sebagai mediator. Perjanjian ini bertujuan mengakhiri konflik seperti Perang Enam Hari (1967) dan Perang Yom Kippur (1973), yang memicu perubahan besar dalam geopolitik kawasan (Quandt, 1986; Mohammad & Bali, 2017). AS terlibat aktif karena kepentingan strategisnya, terutama minyak, serta untuk menandingi pengaruh Uni Soviet yang mendukung Mesir (Bani-Salamah et al., 2012). Meskipun Camp David berhasil memperbaiki hubungan Mesir-Israel, Mesir dikucilkan dari Liga Arab karena dianggap mengabaikan Palestina.

Pada 1991, Konferensi Madrid digelar sebagai respons atas runtuhnya Uni Soviet dan masih berlanjutnya konflik Israel-Arab. Konferensi ini mempertemukan Israel, Palestina (bersama delegasi Yordania), Suriah, dan Lebanon. Meski belum menghasilkan kesepakatan besar, Madrid membuka jalan bagi perdamaian Israel-Yordania (1994) dan perundingan Oslo antara Israel dan Palestina (Rodriguez, 2011; Madrid & Conference, 1992). Oslo Accords (1993 & 1995) menjadi pertemuan penting antara Israel dan PLO, difasilitasi Norwegia dan ditandatangani di Washington dengan Presiden AS Bill Clinton sebagai saksi. Kesepakatan ini mencakup pengakuan PLO sebagai wakil sah Palestina serta pembentukan Otoritas Nasional Palestina dengan otonomi terbatas di wilayah West Bank dan Gaza (Jabareen, 2013; Clinton, 2013). Intifada Pertama (1987–1993) menjadi latar sosial-politik penting yang mendorong perjanjian ini (Rigby, 1992). Meski AIPAC tidak terlibat langsung dalam perjanjian-perjanjian tersebut, lobi kelompok ini terhadap pemerintahan AS memiliki pengaruh besar dalam arah kebijakan luar negeri yang pro-Israel. AIPAC sering menggunakan narasi anti-semitisme dan solidaritas historis untuk menekan anggota kongres mendukung kebijakan pro-Israel (Austin, 2015). Ini menjelaskan kecenderungan presiden-presiden AS untuk memberikan dukungan politik dan militer kepada Israel.

e. Perjanjian Abraham Accords sebagai Upaya Normalisasi Hubungan Diplomatik antara Israel dengan Negara-negara Arab

Proses perdamaian antara Israel dengan negara-negara Arab terutama Palestina dapat dilihat selalu diusahakan. Keinginan besar Amerika untuk melihat hubungan diplomatik di Kawasan Timur Tengah terjalin dengan baik sampai pada akhirnya terbentuklah perjanjian selanjutnya, yaitu Abraham Accords (Lazin, 2023). Abraham Accords merupakan sebuah perjanjian yang disahkan pada 15 September tahun 2020 di masa pemerintahan Donald Trump periode pertama antara Israel dengan beberapa negara-negara Arab seperti Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko dengan Amerika sebagai pihak mediator dalam proses perundingan (Sevilla, 2024). Nama Abraham Accords diambil dari nama Abraham, sosok yang dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam dianggap sebagai bapak leluhur umat monoteistik (memercayai adanya satu Tuhan) (Singer, 2021). Nama Abraham digunakan sebagai cerminan untuk upaya yang digunakan dalam proses membangun perdamaian berdasarkan kesamaan dalam konteks historis dan nilai-nilai yang diterapkan oleh negara-negara yang terlibat dalam perjanjian ini (Vakil & Quilliam, 2023). Tujuan utama dari perjanjian ini kemudian diharapkan dapat membentuk hubungan diplomatik yang dapat mempersatukan keberagaman tersebut.

Isi dari perjanjian Abraham Accords terdiri dari enam poin utama dimana yang pertama adalah kejelasan normalisasi hubungan diplomatik dilakukan secara penuh termasuk dengan pembukaan kedutaan besar masing-masing negara yang terlibat, pertukaran duta besar, dan pengakuan setiap negara sebagai negara berdaulat dan merdeka. Kedua, negara yang terlibat menyetujui kerja sama di bidang ekonomi dan teknologi seperti investasi, energi, perdagangan bebas, kesehatan, dan pertahanan. Ketiga, perjanjian ini memfasilitasi pembukaan jalur penerbangan langsung dengan membuka pertukaran di sektor pariwisata

dan budaya. Keempat, perjanjian ini memberikan komitmen terhadap perdamaian kawasan dengan menolak adanya gerakan militan dan toleransi antar umat beragama. Kelima, dengan Uni Emirat Arab yang menandatangani perjanjian ini, Israel akan menunda rencana untuk menganeksasi West Bank. Keenam, Amerika akan berperan untuk mendukung berjalannya kesepakatan dalam perjanjian ini dengan memberikan insentif diplomatik, militer, dan ekonomi pada negara yang terlibat (Singer, 2021).

Proses pengesahan perjanjian Abraham Accords tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Perundingan terkait perjanjian ini telah berlangsung selama bertahuntahun secara tertutup, namun perundingan serius dimulai pada tahun 2019, yang kemudian dipercepat karena eskalasi konflik yang disebabkan oleh Iran sebab ancaman di Kawasan Timur Tengah semakin masif (Sevilla, 2024). Inisiator utama dari perjanjian ini tidak jauh-jauh dari pihak mediator utama yaitu Amerika Serikat dengan spesifikasi Presiden Donald Trump selaku presiden Amerika pada saat itu, Jared Kushner selaku penasihat senior di Gedung Putih yang juga seorang menantu dari presiden Donald Trump, dan utusan khusus presiden yang akan berperan masif dalam tim perdamaian di Timur Tengah Pemerintahan Donald Trump yaitu Avi Berkowitz (Myrvold, 2022).

Berdasarkan perjanjian-perjanjian sebelumnya, AIPAC juga secara tidak langsung terlibat, namun perlu diketahui bahwa dalam proses pembentukan Abraham Accords, terdapat hubungan tak kasat mata yang muncul. Jared Kushner sebagai salah satu inisiator merupakan seorang Yahudi Ortodoks yang taat. Sebagai seseorang yang ditunjuk oleh Donald Trump untuk memimpin pengembangan rencana perdamaian antara PalestinaIsrael yang disebut Peace to *Prosperity Plan atau Deal of the Century*, perannya cukup krusial dalam mendukung kepentingan Israel (Benoist, 2019). Setelah itu, dengan bagaimana Istana Putih memberikan laporan kepada AIPAC terkait tindakan yang dilakukan di Timur Tengah membuat hal ini terlihat cukup menjadi sebuah pembuktian bahwa memang AIPAC memiliki pengaruh terhadap kebijakan luar negeri (Fisk, 2018).

f. Strategi AIPAC dalam Memengaruhi Perjanjian Abraham Accords

Dalam melihat bagaimana peran AIPAC terhadap perjanjian Abraham Accords, terdapat berbagai bentuk strategi yang bisa dibedah ketika melihat keterlibatan banyak pihak dalam proses pengesahan perjanjian tersebut. Upaya lobi dari AIPAC tidak dilakukan dengan sembrono atau tidak formal, melainkan langsung mengundang para anggota kongres untuk hadir pada konferensi tahunan yang disebut AIPAC Policy Conference yang isinya bukan hanya terdiri dari anggota AIPAC saja namun juga para pejabat maupun pemimpin usaha kaya yang pro-Israel. Bukan hanya itu, AIPAC juga mengatur kunjungan untuk anggota kongres ke Israel untuk memberikan pemahaman terkait bagaimana pentingnya untuk Amerika membantu Israel di Timur Tengah (Firdaus, 2023). Donald Trump pada saat mencalonkan diri untuk menjadi presiden periode pertama hadir dalam konferensi tahun AIPAC dengan memberikan pidato yang substansinya mengarah pada dukungannya terhadap Israel dan bagaimana kebijakannya nanti dapat membawa situasi yang baik dan signifikan bagi Israel yang masih memiliki konflik dengan negara-negara di Kawasan Timur Tengah. Dimana ketika Donald Trump akhirnya terpilih menjadi presiden, janji-janji besar yang diwujudkan adalah mengakui bahwa Yerusalem adalah ibukota Israel dengan memindahkan kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv menuju wilayah tersebut (U.S. Embassy in Israel, 2020) dan menjadi mediator pada perjanjian Abraham Accords (Begley, 2016).

Lobi AIPAC terhadap Kongres dan Eksekutif Amerika Serikat

Hal yang paling menonjol dari pendekatan yang dilakukan oleh AIPAC adalah dengan memberikan dukungan finansial melalui koneksi dari Political Action Comittes (PACs) (IRmep, 2023). PAC bekerja secara mandiri namun sering memiliki tujuan yang beriringan dengan agenda AIPAC, yang kemudian

membuat AIPAC menggunakan koneksi ini untuk memaksimalkan pengaruh politiknya tanpa melanggar regulasi apapun dengan memberikan kontribusi secara langsung pada kampanye politik calon politikus yang dilihat sejalan dengan tujuan kedua kelompok tersebut (Track AIPAC, n.d.). Dukungan ini mencakup bantuan finansial yang membuat AIPAC dapat menjalin hubungan erat dengan para legislator atau kongres yang pada akhirnya dapat mendorong kebijakan yang menguntungkan Israel seperti bantuan militer, pengesahan perjanjian diplomatik, atau memberikan sanksi kepada negara-negara yang dianggap sebagai ancaman terhadap Israel (Busheva, 2019).

Perlu diketahui bahwa dukungan dana yang diberikan tidak hanya berasal dari satu organisasi saja, namun kepentingan yang sama mampu menjadi tali penghubung bagi kelompok-kelompok pro-Israel untuk bersatu dalam mendukung kandidat yang terlihat mampu mengakomodir kepentingan tersebut. Jumlah dari para pelobi pro-Israel memberikan sejumlah uang yang cukup besar dengan rincian yaitu Koalisi Yahudi Republik memberikan sebesar $80.000 di tahun 2016, J Street sebesar $400.00, dan AIPAC sebesar $3.600.000 dengan eskalasi yang terus bertambah sejak tahun 2004 (Sultan, 2017).

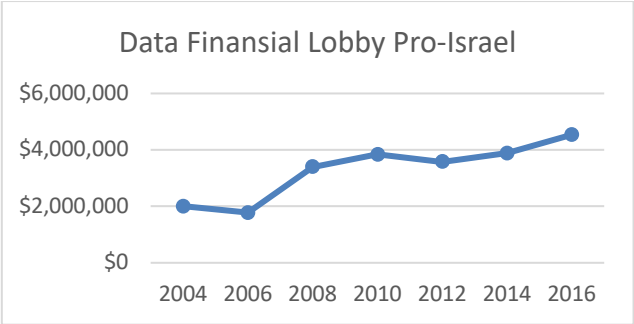

Gambar 1.1 Jumlah Pendanaan Lobby Pro-Israel 2004-2016
Sumber: Opensecrets, 2017

Jumah pengeluaran lobi pro-Israel melonjak tinggi di tahun 2016 ketika Trump menjadi kandidat dari pemilihan presiden di Amerika (Opensecrets, 2017). Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa keterlibatan kelompok kepentingan non-pemerintahan. Khususnya, bagaimana AIPAC sangat berperan besar dalam konteks kampanye dan dukungan terhadap eksekutif dan kongres yang dapat membantu untuk mengakomodir kepentingan kelompok-kelompok lobi pro-Israel di meja pemerintahan Amerika.

Dalam melihat bagaimana AIPAC menggunakan strategi lobi pada kongres dan eksekutif pada perjanjian Abraham Accords ada beberapa tindakan yang dilakukan. Konferensi menjadi wadah yang masif digunakan untuk memengaruhi opini publik dan media untuk memastikan bahwa pengesahan perjanjian tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tindakan ini dilakukan secara terorganisir dari mulai membantu Donald Trump pada kampanye politik, pemberian tekanan politik kepada anggota kongres melalui surat, dan panggilan telepon terus-menerus menjadi langkah-langkah yang juga dilakukan oleh AIPAC untuk mendukung janji politik Trump ketika masih menjadi kandidat presiden terpilih (Lazin, 2023). Setelah terpilih, Trump pun menunjuk Jared Kushner, menantu sekaligus penasihat senior di istana putih untuk menjadi peran kunci dari perumusan Abraham Accords yang pada saat itu juga telah aktif dalam membangun strategi perdamaian di Timur Tengah dengan pendekatan yang lebih pragmatis dan tidak berporos hanya pada konflik yang terjadi antara Palestina-Israel (Lighstone, 2022). Bersama dengan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Duta Besar Amerika untuk Israel David Friedman, Kushner

kemudian mengadakan pertemuan untuk menjalin negosiasi secara rahasia dengan Israel dan Uni Emirat Arab yang kemudian menjadi cikal bakal pengesahan Abraham Accords (Lazin, 2023).

Pembentukan Opini Publik melalui Media

Pembentukan opini publik menjadi salah satu strategi yang diterapkan oleh AIPAC, dimana hal ini sebetulnya menjadi hal paling fundamental ketika pendukung gerakan zionisme di Amerika menyadari bahwa protes atau suara-suara masyarakat begitu penting untuk menjadi jembatan terhadap pembentukan keputusan, sehingga memiliki aktivis yang pada awal pembentukan komite adalah Eddie Jacobson, dimana hal ini merupakan langkah besar yang dilakukan (Rossinow, 2018). Seiring berkembangnya teknologi, pemanfaatan media di era yang serba digital kemudian membuat semua pihak termasuk AIPAC ingin mendapatkan panggungnya sendiri untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, salah satunya adalah bantuan untuk Israel terkait normalisasi hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab dalam wadah yang disahkan tahun 2020 kemarin yaitu Abraham Accords (Guzansky & Marshall, 2020).

Pembentukan narasi untuk memengaruhi opini publik bukanlah sebuah cara baru yang dilakukan agar suatu keputusan yang dibentuk dapat diterima oleh masyarakat umum, melainkan telah menjadi bagian dari taktik perpolitikan yang telah lama dilakukan (Odeh, 2014). Pembentukan opini publik dengan pemberitaan bias oleh Amerika untuk Israel terletak pada pandangan politik yang merasa bahwa Israel memiliki musuh yang sama di Kawasan Timur Tengah, terutama dalam konteks pemberantasan teroris dan ancaman dari kelompok-kelompok ekstremis Islam (Mearsheimer & Walt, 2006). Media besar bernama If Americans Knew (IAK) memberikan bukti bagaimana Amerika memberikan bias terhadap isu Israel terkait konfliknya dengan Palestina dengan memberikan laporan terkait jumlah kematian warga Israel yang disebabkan oleh Palestina lebih sering daripada sebaliknya. IAK mendapatkan sumber berita dari B'Tselem yang merupakan organisasi hak asasi manusia khusus Israel sehingga IAK membuat dua laporan berbeda, dimana salah satunya mengakumulasi jumlah kematian secara umum dan satunya adalah jumlah kematian anak yang membuat berita oleh IAK seakan-akan terlihat bahwa hanya Israel yang menjadi korban terbanyak dari konflik yang terjadi (Odeh, 2014).

Salah satu media besar yang memberikan pengaruh signfikan pada pembentukan opini publik terkait isu-isu di Timur Tengah terutama isu yang berkaitan dengan Israel adalah media think tank yang bernama *Washington Institute for Near East Policy* (WINEP) yang didirikan oleh Barbi Weinberg. Media WINEP lebih memfokuskan pada studi terkait isu di Timur Tengah yang membuat media ini menyajikan data berdasarkan penelitian para akademisi untuk membuat berita yang disajikan bernilai faktual dan diharapkan mampu menjadi bahan edukasi mengenai isu yang menjadi perbincangan. Media WINEP terbentuk dari keinginan besar untuk memfokuskan agenda penelitian pada hubungan antara Israel dengan negara-negara Arab baik dari sisi politik, isu keamanan, dan bagaimana Amerika terlibat dalam konteks kebijakan terhadap Timur Tengah. Namun, hal pertama yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah bahwa orang-orang di belakang WINEP merupakan pro-Israel, sehingga hal ini tentu mengundang rasa penasaran mengenai apakah publikasi berita dari media ini terkesan bias, sesuai dengan bagaimana substansi yang bisa dilihat pada laman media tersebut (Washington Institute for Near East Policy, n.d.).

Barbi Wienberg merupakan istri dari Larry Weinberg, mantan presiden AIPAC dari tahun 1967-1982 yaitu Larry Weinberg (AIPAC, n.d.). Sebagai seorang aktivis pro-Israel dan perempuan pertama yang memimpin federasi Yahudi di Los Angeles, Barbi melihat bahwa AIPAC memerlukan mitra yang dapat mewadahi kepentingan mereka dalam konteks analisis kebijakan di Timur Tengah yang menyediakan berita aktual secara lebih profesional, non-partisan, dan mampu menarik perhatian para elit Washington, sehingga terbentuklah WINEP sebagai produk dari angan-angan tersebut. Namun, Barbi tidak sendiri dalam

membentuk medium tersebut, Martin Indyk yang sebelumnya menjabat sebagai direktur peneliti di AIPAC turut serta melibatkan diri di WINEP dan menjadi penyedia kerangka pemikiran dengan tujuan untuk menyajikan analisis kebijakan Timur Tengah dengan sudut pandang yang pro-Israel sehingga pembawaan arus berita bisa membantu mengakomodir opini publik terkait Israel. Anggota lain yang terlibat di WINEP adalah Dennis Ross selaku penasihat senior yang merupakan mantan negosiator pada upaya perdamaian antara Palestina-Israel dengan pandangannya yang cukup condong pada Israel, serta namanya yang cukup terkenal karena pernah satu barisan dengan tim kebijakan luar negeri yang cukup dekat dengan AIPAC, serta Robert Satloff selaku direktur eksekutif WINEP yang memiliki rekam jejak hubungan erat dengan para pendonor untuk AIPAC (Washington Institute for Near East Policy, n.d.).

Dalam penulisan terhadap analisis mengenai Timur Tengah, upaya normalisasi Israel dengan negara-negara Arab menjadi prioritas WINEP. Hal ini dapat dilihat dari berita-berita mengenai perjanjian-perjanjian terdahulu yang dianalisis untuk melihat dampak yang dapat dilihat (David Schenker, 2024). Pada konteks Abraham Accords, sebelum proses pengesahannya, WINEP telah menulis analisis mengenai upaya normalisasi Israel terhadap negara-negara teluk dengan berfokus pada hubungan antara UEA dengan Israel. Salah satu artikel mengulik alasan mengapa UEA menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, yaitu untuk mencegah aneksasi Israel terhadap West Bank, dimana hal ini bisa menjadi ancaman bagi solusi dua negara. Selain itu, artikel ini juga menampilkan reaksi dari negara-negara teluk terkait keputusan tersebut, dimana Bahrain dan Oman mendukung sedangkan Arab Saudi dan Kuwait yang menolak sebelum solusi dua negara disahkan (DeLozier, 2020).

Selain itu, WINEP juga memberikan bukti lebih lanjut agar normalisasi ini seakan-akan harus disahkan secepatnya dengan mempublikasikan hasil analisis bahwa negara-negara teluk memiliki ancaman yang sama yaitu dari Iran dan kelompok-kelompok militan ekstremis yang beraliran sunni. WINEP memberikan wawasan terkait perlunya pertimbangan secara strategis apabila UEA ingin melakukan hubungan normalisasi dengan Israel dan bagaimana dinamika regional yang muncul, terutama untuk menghalau ancaman tersebut (Leaf, 2020). Apabila menilik dari publikasi berita di medium WINEP setelah Abraham Accords telah disahkan, keputusan-keputusan pemerintah terkait Israel terutama Abraham Accords selalu memberikan narasi-narasi yang terlihat apakah hal tersebut dapat menguntungkan Israel atau tidak. Upaya yang dapat dilihat adalah WINEP masih memberikan sejumlah data setelah Abraham Accords disahkan dengan melihat dampak yang terjadi, khususnya pasca normalisasi antara Israel dengan negara-negara Arab yang memperlihatkan dampak positif (AlSaied, 2022). Hal ini tentu sejalan dengan keinginan AIPAC, yang membuat WINEP benar-benar berjalan beriringan dengan komite tersebut untuk memengaruhi keputusan para pemangku kebijakan, khususnya keputusan presiden terkait isu di Timur Tengah, dalam hal ini adalah upaya normalisasi diplomatik antara Israel dengan negara-negara Arab.

Aliansi dengan Kelompok Kepentingan Kristen Evangelist

Proses perubahan negara-negara Barat dari yang awalnya bagian dari antisemitisme menjadi pro-semitisme tidak jauh-jauh dari gerakan kelompok agama Kristen yang meyakini bahwa kelompok Yahudi adalah bangsa pilihan tuhan (Inbari et al., 2021). Hal ini yang kemudian menjadi titik balik dari bagaimana dunia melihat kelompok Yahudi diperlakukan, terutama setelah terjadinya peristiwa Holocaust. Oleh sebab itu, tidak sedikit dari kelompok Kristen merasa perlu mengadvokasi kepentingan kelompok Yahudi ke ranah kehidupan sosial agar mereka dapat diperlakukan sebagai seorang manusia pada umumnya, dimana hal ini hanya bisa dijamin apabila pemerintahan juga ikut serta untuk turun tangan, tidak terkecuali pemerintahan Amerika Serikat (Inbari et al., 2021).

Salah satu hal paling menonjol dalam pembentukan kebijakan di era Donald Trump adalah adanya keterlibatan kelompok agama yang bernama Kristen Evangelist yang mendukung bentuk-bentuk bantuan untuk Israel sesuai dengan prinsip ketuhanannya terhadap kelompok Yahudi. Kelompok Kristen Evangelist merupakan kelompok dengan kekuatan berbasis teologi yang memiliki pengaruh besar terhadap perpolitikan Amerika Serikat, dalam cakupan politik konservatif (Inbari et al., 2021). Kelompok Kristen Evangelist telah terlibat dalam perpolitikan Amerika dan sering bersetuju dengan dinamika politik dari partai Republik sejak tahun 1970 dengan mengedepankan prinsip agama seperti prinsip terlahir kembali (born again), otoritas absolut dalam Alkitab, dan misi penyebaran ajaran dalam injil ke seluruh dunia. Sederhananya, bagi kelompok Kristen Evangelist, membela gerakan zionis bukan hanya sebatas kepentingan geopolitik, namun juga sebuah mandat dari kepercayaan agama (Gör et al., 2024).

Dukungan dari kelompok Kristen Evangelist kemudian bereskalasi dengan membentuk aliansi dengan AIPAC melalui mobilisasi opini publik dan memengaruhi kebijakan luar negeri Amerika dengan melakukan kolaborasi bersama Christian United for Israel (CUFI), didikan pada tahun 2006 oleh Pastor John Hagee yang nantinya akan menjadi jembatan penghubung antara keyakinan dalam agama dan advokasi pada kebijakan luar negeri yang akan dibentuk. CUFI sendiri merupakan organisasi yang mewadahi kepentingan dari kelompok Kristen Evangelist di Amerika terkait dukungannya terhadap Israel. Sistem CUFI dalam berkontribusi untuk memengaruhi kebijakan adalah dengan mengadakan konferensi nasional yang mengundang anggota kongres Amerika, pejabat Israel, dan tokoh Kristen Evangelist dengan tujuan untuk membahas isu-isu kebijakan luar negeri Amerika terhadap Israel. CUFI juga menjadi payung untuk melawan propaganda anti-Israel, gerakan Boycott Divestment and Sanctions (BDS), pemahaman teologi yang tidak sejalan dengan mereka, maupun ancaman politik yang berusaha untuk mendelegitimasi keberadaan Israel sebagai sebuah negara (Christians United for Israel, n.d.). Selain itu, aliansi yang terbentuk dengan AIPAC kemudian terjalin dengan seringnya tokoh dari kelompok Kristen Evangelist datang pada acara konferensi AIPAC sebagai tamu khusus, dan juga tidak jarang pemimpin dari kelompok ini menjadi pembicara pada acara-acara yang diselanggarakan oleh AIPAC yang juga bertujuan untuk membahas terkait kebijakan luar negeri Amerika terhadap Israel (Stevens, 2023).

Kekuatan kelompok Kristen Evangelist ini kemudian dapat dilihat pada masa pemerintahan Donald Trump periode pertama dengan bagaimana kebijakankebijakan luar negeri yang terlihat sangat pro-Israel seperti pemindahan kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem, pengakuan atas Dataran Tinggi Golan, dan termasuk juga pengesahan terhadap perjanjian Abraham Accords (Gorski, 2017). Kelompok Kristen Evangelist melihat Trump sebagai sosok pemimpin yang secara spiritual mampu memperkuat posisi Israel di akhir zaman sesuai dengan apa yang mereka yakini. Dalam keyakinan kelompok tersebut, hubungan normalisasi secara diplomatik antara Israel dan negara-negara Arab melalui perjanjian Abraham Accords adalah salah satu upaya untuk mewujudkan kepercayaan dalam agama mereka (Gorski, 2017). Kendati keterlibatan dari kelompok Kristen Evangelist tidak terjadi secara langsung, namun perannya terhadap pengesahan Abraham Accords sangat jelas sebab memiliki dimensi politik yang berbasis teologi yang cukup signifikan dan dapat terlihat dari nama perjanjian tersebut, dimana nama Abraham dianggap sebagai simbol dari bapak iman bagi umat Yahudi, Kristen, dan Islam. Hal ini kemudian menjadi salah satu alasan yang membuat kelompok Kristen Evangelist melegitimasi kesepakatan perjanjian ini (Inbari et al., 2021).

Kesimpulan

Gerakan anti-semitisme yang telah terjadi begitu lama, memunculkan perlawanan berwujud zionisme, dimana hal ini kemudian menjadi akar dari bagaimana kelompok-kelompok yang ingin

mendukung hak asasi bangsa Yahudi berkembang menjadi keinginan untuk membuat sebuah persinggahan yang aman bagi mereka dengan masuk ke dalam proses pembentukan kebijakan yang mampu mengakomodir hak-hak tersebut. Sebagai kelompok yang dibantai pada peristiwa holocaust, peristiwa ini membuat pandangan dunia global berubah menjadi rasa simpati yang kuat sehingga tidak sedikit yang ikut berjalan beriringan. Hal inilah yang kemudian menjadi cikal bakal pembentukan sebuah komite bernama *America-Israel Public Affairs Committee* (AIPAC).

AIPAC menjadi satu dari begitu banyak kelompok kepentingan di Amerika yang berusaha untuk mewujudukan tujuannya dengan masuk ke dalam pemerintahan, khususnya untuk dapat memengaruhi kebijakan luar negeri dengan harapan membantu Israel dapat membangun hubungan normalisasi dengan negaranegara Arab. Sebagai sebuah kelompok kepentingan, AIPAC perlu membangun rasa percaya dan 'patuh' dari para legislatif dan eksekutif seperti kongres dan presiden. Oleh sebab itu, AIPAC harus melakukan cara apapun agar kebijakan luar negeri dapat dimanifestasikan dengan baik.

Untuk dapat memengaruhi kebijakan luar negeri, AIPAC tidak secara langsung dapat terlibat. Oleh sebab itu, banyak strategi yang dilakukan oleh kelompok tersebut sehingga suaranya dapat dilibatkan pada proses pembentukan kebijakan. Adapun strategi-strategi yang dilakukan adalah menggunakan posisiposisi yang dimiliki oleh anggota sebagai alat untuk masuk ke dalam kebijakan. Salah satu langkah paling berpengaruh adalah melakukan lobi secara langsung kepada para kongres dan presiden dengan memberi bantuan selama masa kampanye seperti bantuan pendanaan dan akomodasi tempat untuk menyuarakan gagasan pada konferensi yang diadakan tiap tahun oleh AIPAC yang mengundang para tokoh berpengaruh dan mendukung gerakan zionisme.

Selain itu, pemanfaatan medium seperti media massa, analisis isu, maupun penyampaian berita untuk memengaruhi opini publik juga menjadi senjata utama sehingga mereka dapat disetir untuk berpihak pada Israel sesuai dengan apa yang ditunjukkan melalui laman media berita langsung atau laman media sosial. Hal ini juga disandingkan dengan apabila muncul ketidaksetujuan terkait berita yang dipublikasikan, julukan anti-semitisme kemudian akan dilontarkan, seakan-akan penolakan atau tidak bersetuju membuat orang tersebut membenci Yahudi. Proses ini tidak akan berjalan begitu lancar apabila AIPAC tidak dibantu oleh kelompok kepentingan lain yang sama-sama mendukung gerakan zionisme, yaitu kelompok Kristen Evangelist yang berkeyakinan bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan Tuhan. Untuk mendukung keyakinan tersebut, Abraham Accords yang merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Amerika kemudian diharapkan dapat membantu menjaga eksistensi Israel sebagai sebuah negara di Kawasan Timur Tengah.

Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan dan kekurangan yang perlu penulis sampaikan. Pertama, cakupan analisis yang berfokus pada strategi AIPAC terhadap pembentukan perjanjian Abraham Accords dan kaitannya dengan kebijakan luar negeri Amerika di masa pemerintahan Donald Trump. Hasil temuan kemudian belum bisa dikatakan menyeluruh untuk melihat bagaimana dinamika AIPAC dari sisi strategi di masa pemerintahan presiden-presiden lain di Amerika kendati penulis sempat menyebut peran AIPAC di beberapa masa pemerintahan presiden sebelumnya. Namun, hal itu masih dikatakan belum dijelaskan secara lebih rinci dan menyeluruh. Kedua, sumber yang penulis gunakan didominasi oleh data sekunder, dan data primer hanya pada sumber website AIPAC dan tidak secara langsung melakukan wawancara dengan aktor pemangku kebijakan atau anggota dari kelompok kepentingan terkait. Selanjutnya, tidak semua strategi penulis jelaskan pada penulisan ini.

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah penulis paparkan, terdapat beberapa saran yang penulis akan sampaikan. Pertama, penulis menyarankan agar di penelitian selanjutnya, dapat memperluas cakupan analisis dari strategi yang AIPAC gunakan di berbagai periode pemerintahan untuk melihat

perbandingan terhadap pola yang dipengaruhi oleh AIPAC pada kebijakan luar negeri Amerika. Kedua, data primer bisa diperoleh dengan langsung melakukan wawancara terhadap aktor yang terlibat seperti komunitas Yahudi yang mendukung pergerakan AIPAC dan kelompok Kristen Evangelist untuk memperdalam analisis. Terakhir, perlunya pemahaman lebih mendalam mengenai mengapa AIPAC sangat menginginkan perjanjian normalisasi hubungan antara Israel dengan negara-negara Arab disahkan, dan kenapa Abraham Accords menjadi sebuah perjanjian yang difokuskan oleh AIPAC untuk diakomodir pemerintah Amerika.

Daftar Pustaka

AIPAC. "Egyptian-Israeli Peace Treaty." *American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)*. Accessed February 12, 2025. https://www.aipac.org/resources/eyptian-israeli-peace-treaty-bkxyg-apblj-j2mel.

AIPAC. *Policy Agenda*. Accessed May 3, 2025. https://www.aipac.org/policy.

AIPAC. *Promoting Peace: Advancing Regional Cooperation*. Accessed May 3, 2025. https://www.aipac.org/policy-peace.

Al Jazeera. (2020). Israel, Morocco Agree to Normalise Relations in US-Brokered Deal. *Al Jazeera*, https://www.aljazeera.com/news/2020/12/10/israel-morocco-agree-to-normalise-relations-in-us-brokered-deal

Almeida, E., & Rosero, A. (2021). Reflections on qualitative research in education. *Revista Cognosis. Revista de Filosofía, Letras y Ciencias de La Educación*, *VI*(Abril), 101–118. https://doi.org/10.33936/cognosis.v6i0.3402

Almond, G. A. (1958). A Comparative Study of Interest Groups and the Political Process. *American Political Science Review*, *52*(1), 270–282. https://doi.org/10.2307/1953045

American Israel Education Foundation. "Home." Accessed March 15, 2025. https://www.aiefdn.org/.

American Israel Public Affairs Committee. "Congress and the U.S.-Israel Relationship." *AIPAC*. Accessed March 2, 2025. https://www.aipac.org/resources/congress-and-the-us-israel-relationship.

American Israel Public Affairs Committee. "Near East Report Articles." *AIPAC*. Accessed March 2, 2025. https://www.aipac.org/resources/category/NearEastReportArticle.

American Israel Public Affairs Committee. 2025. "About AIPAC PAC." *AIPAC PAC*. Accessed February 2, 2025. https://www.aipacpac.org/about.

Anugerah, R. (2023). *International Journal of Sustainable Development & Future Studies The Role of Community Organisations as Interest Groups in Palu City : A Case Study of Alkhairaat Organisation*. *1*(November), 68–72.

Austin, T. R. (2015). Hijacking American Foreign Policy in the Middle East: An Analysis of the Power of the American Israel Public Affairs Committee. *CEUR Workshop Proceedings*, *1542*, 33–36.

Bani-Salamah, M. A. R., Bani Salameh, M. T., & Al-Shra'h, M. K. (2012). The Camp David Accord: Lessons and facts. *The Arab Journal for Arts*, *2A*(2), 41–66.

Ben-David, Lenny. (2022). The Evolution of AIPAC's Political Operation in Washington over 50 Years: An Eyewitness Perspective. *Jerusalem Center for Public Affairs*. Accessed February 2, 2025. https://jcpa.org/article/the-evolution-of-aipacs-political-operation-in-washington-over-50-years-an-eyewitness-perspective.

Busheva, S. M. (2019). The Analysis of AIPAC as a Socio-Political Unit that has Strong Impact on the Policy of the United States. *Politicus*, *1*, 25–28. https://doi.org/10.24195/2414-9616-2019-1-25-28

Christians United for Israel. (n.d). About CUFI. Accessed April 8, 2025. https://cufi.org/about/

Clinton, B. (2013). *the Two Leaders Redrew*. *23*(3), 24–40.

Creswell. JW. (2015). Research Design: Pendekatan Kulaitatif, Kuantitatif dan Mixed. *Pustaka Pelajar*, 383.

Cutter, G. (2019). *The Pro-Israel Lobby, The United States, and The pro-Israel lobby's influence on us foreign policy.pdf*. *June*.

DeLozier, Elana. (2020). The Normalization Deal Splits the Gulf States—for Now. *The Washington Institute for Near East Policy*. Accessed April 7, 2025. https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/normalization-deal-splits-gulf-states-now.

Dowty, A. (2014). Prelude to the Arab–Israel Conflict: European Penetration of Nineteenth-century Ottoman Palestine. *Contemporary Review of the Middle East*, *1*(1), 3–24. https://doi.org/10.1177/2347798913518453

Egel, D., Efron, S., & Robinson, L. (2021). Peace Dividend: Widening the Economic Growth and Development Benefits of the Abraham Accords. *Peace Dividend: Widening the Economic Growth and Development Benefits of the Abraham Accords*, *March*. https://doi.org/10.7249/pea1149-1

Encyclopaedia Britannica. s.v. (n.d). Judaism. Accessed March 15, 2025. https://www.britannica.com/topic/Judaism.

Feldman, D. (2018). Toward a history of the term "anti-Semitism." *American Historical Review*, *123*(4), 1139–1150. https://doi.org/10.1093/ahr/rhy029

Firdaus, R. M. (2023). The Strategy and Effectiveness of the American Israel Public Affairs Committee in Lobbying the United States Congress. *National Interest*, *3*(11), 48–59.

Gör, A., Akademisi, P., Fakültesi, İ. G., İlişkiler, U., Dalı, A., Asst, R., National, T., & Academy, P. (2024). *Understanding the USA ' s Support for Israel within the Context of Christian Zionism*. 75–92.

Gorski, P. (2017). Why evangelicals voted for trump: A critical cultural sociology. *American Journal of Cultural Sociology*, *5*(3), 338–354. https://doi.org/10.1057/s41290-017-0043-9

Gultom, Y. S. M., & Miftah, H. Z. (2024). The Role of the Jewish Lobby Toward US Foreign Policy Making on the 2023 Israel-Palestine War (Case of AIPAC). *Hasanuddin Journal of Strategic and International Studies (HJSIS)*, *2*(2), 38–49. https://doi.org/10.20956/hjsis.v2i2.34405

Guzansky, Y., & Marshall, Z. A. (2020). The Abraham Accords: Immediate Significance and Long-Term Implications. *Israel Journal of Foreign Affairs*, *14*(3), 379–389. https://doi.org/10.1080/23739770.2020.1831861

Hasyim, M. S. (2019). Perkembangan Zionisme dan Berdirinya Negara Israel. *Jurnal Al-Asas*, *II*(1), 47.

Hitchcock, D. (2024). Defining Antisemitism. *Topoi*. https://doi.org/10.1007/s11245-024-10109-9

Imaginations, R. (n.d.). *The Balfour Declaration : From Imagining a State to Re-imagining Majority-Minority Relations in Jewish Thought and the Jewish State*.

If Americans Knew. (n.d). What Every American Needs to Know About Israel/Palestine. Accessed April 5, 2025. https://ifamericansknew.org/.

Inbari, M., Bumin, K. M., & Byrd, M. G. (2021). Why do evangelicals support Israel? In *Politics and Religion* (Vol. 14, Issue 1). https://doi.org/10.1017/S175504831900052X

Jabareen, H. (2013). 20 Years of Oslo: The green line's challenge to the statehood project. *Journal of Palestine Studies*, *43*(1), 41–50. https://doi.org/10.1525/jps.2013.43.1.41

Kardo Karim Rached Mohammad, & Ahmad Omar Bali. (2017). The Six-Day War and Its Impact on Arab and Israeli Conflict. *Journal of History Research*, *7*(2), 90–101. https://doi.org/10.17265/2159-550x/2017.02.004

Kharismawati, A. (2009). Perkembangan Antisemitisme dalam Perspektif Hubungan Internasional. *Jurnal Global & Strategis ISSN*, 81–97. http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Perkembangan Antisemitisme dalam Perspektif Hubungan Internasional.pdf

Lazin, F. A. (2023). President Donald Trump's Abraham Accords initiative: Prospects for Israel, the Arab states, and Palestinians. *Politics and Policy*, *51*(3), 476–487. https://doi.org/10.1111/polp.12533

Leaf, Barbara A. (2020). The Gulf's Calculus on UAE-Israel Deal. *The Washington Institute for Near East Policy*. Accessed April 7, 2025. https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/gulfs-calculus-uae-israel-deal.

Lightstone, Aryeh. (2022). Behind the Curtain at the Creation of the Abraham Accords. *Jerusalem Strategic Tribune*. Accessed March 29, 2025. https://jstribune.com/lightstone-behind-the-curtain-of-the-abraham-accords/.

Madrid, T., & Conference, P. (1992). The Madrid Peace Conference. *Journal of Palestine Studies*, *21*(2), 117–149. https://doi.org/10.2307/2537235

Maiwan, M. (2016). Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan. *Ilmiah Mimbar Demokrasi*, *15*, 75–91.

Mearsheimer, J. J., & Walt, S. M. (2006). The Israel Lobby and U.S. foreign policy. *Middle East Policy*, *13*(3), 29–87. https://doi.org/10.1111/j.1475-4967.2006.00260.x

Meriem Dalila, S. (2022). The American Jewish Lobby's Method of Influence on American Politics Introduction. *Journal of Law, Society and Authority*, *11*, 2600–6219. https://www.bustle.com/articles/121572-whatever-happened-to-john-edwards-the-north-

Myrvold, C. O. A. A. (2022). *The Abraham Accords: A Comparative Perspective on American Foreign Policy in the Middle East*. *May*, 1–71. https://munin.uit.no/handle/10037/254880A-https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/25488/thesis.pdf

Odeh, R. K. (2014). *The Impact of Changing Narratives on American Public Opinion Toward the U . S . - Israel Relationship*.

OpenSecrets. "Pro-Israel Interests Spent Over $25 Million on 2016 Elections." *OpenSecrets News*, February 27, 2017. Accessed March 29, 2025. https://www.opensecrets.org/news/2017/02/pro-israel-interests-2016.

Pro-Israel PACs Contributions to Candidates, 2015–2016. *OpenSecrets*. Accessed May 7, 2025. https://www.opensecrets.org/political-action-committees-pacs/industry-detail/Q05/2016.

Pauley, B. F. (2011). Antisemitism: A History, ed. Albert S. Lindemann and Richard S. Levy. *The English Historical Review*, *CXXVI*(521), 904–905. https://doi.org/10.1093/ehr/cer198

Prof. Dr. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta R&D. In *Alfabeta, CV* (Issue April).

Quandt, W. B. (1986). Camp David and Peacemaking in the Middle East. *Political Science Quarterly*, *101*(3), 357–377. https://doi.org/10.2307/2151620

Rigby, A. (1992). Living the intifada. *Choice Reviews Online*, *29*(09), 29-5341-29–5341. https://doi.org/10.5860/choice.29-5341

Rise, T. (2020). *A Brief History Of Antisemitism Definition of Antisemitism*. www.adl.org

Rodriguez, F. (2011). The 1991 Madrid Peace Conference: US Efforts Towards Lasting Peace in the Middle East Between Israel and its Neighbors. *University of New Orleans Theses and Dissertations*, 62. https://scholarworks.uno.edu/td/1343/

Rossinow, D. (2018). The Edge of the Abyss: The Origins of the Israel Lobby, 1949-1954. *Modern American History*, *1*(1), 23–43. https://doi.org/10.1017/mah.2017.17

Rynhold, J. (2021). The Future of US–Israeli Relations. *Survival*, *63*(5), 121–146. https://doi.org/10.1080/00396338.2021.1982202

Sehar, S. M. (n.d.). *American Zionism : Genesis of US-Backed Israeli Exceptionalism*.

Sevilla, H. J. A. (2024). the Abraham Accords and Peace in the Middle East: Regional Reception and Implications. *Jurnal CMES*, *17*(1), 1. https://doi.org/10.20961/cmes.17.1.85649

Shlaim, A. (2009). The Balfour Declaration and its Consequences. *Israel and Palestine: Reappraisals, Revisions, Refutations*, 3–24.

Singer, J. (2021). The Abraham Accords: Normalization Agreements Signed by Israel with the U.A.E., Bahrain, Sudan, and Morocco. *International Legal Materials*, *60*(3), 448–463. https://doi.org/10.1017/ilm.2021.18

Stevens, Henry. "How Christian Evangelists Manipulate U.S.-Israel Policies.(2023). *Spheres of Influence*,. https://spheresofinfluence.ca/how-christian-evangelists-manipulate-us-israel-policies/.

The Independent. (2018). Jared Kushner's Business Connections to Israel Are Creating a Dangerous Conflict of Interest. *The Independent*. https://www.independent.co.uk/voices/jared-kushner-israel-business-connections-no-scrutiny-palestine-difference-us-relations-donald-trump-

a8153411.html.
The Washington Institute for Near East Policy. "Our Mission & History." *The Washington Institute*. Accessed February 5, 2025. https://www.washingtoninstitute.org/about/our-mission-history.
The Washington Institute for Near East Policy. *The Washington Institute*. Accessed February 5, 2025. https://www.washingtoninstitute.org.
Track AIPAC. "Congress." Accessed March 23, 2025. https://www.trackaipac.com/congress.
Track AIPAC. *Israel Lobby Tracker.* Accessed February 1, 2025. https://www.trackaipac.com/.
Trump, Donald. "Read Donald Trump's Speech to AIPAC." *TIME*, March 21, 2016. https://time.com/4267058/donald-trump-aipac-speech-transcript.
Trump, Donald J. (2017). Statement by President Trump on Jerusalem. *U.S. Embassy in Israel*. Accessed March 29, 2025. https://il.usembassy.gov/statement-by-president-trump-on-jerusalem.
Ummah, M. S. (2019). A JEWISH STATE. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017
United States Department of State. (2021). U.S. Relations With Israel. Last modified January 20, 2021. https://www.state.gov/u-s-relations-with-israel/.
U.S. Department of State. (2016). Ten-Year Memorandum of Understanding Between the United States and Israel. Last modified September 14, 2016. https://2017-2021.state.gov/ten-year-memorandum-of-understanding-between-the-united-states-and-israel/.
Ur, A., & Mphil, R. (2020). *Causes behind the Abraham Accord and its consequences for the Peace Process in the Middle East*. *2*(2), 73–82.
Vakil, S., & Quilliam, N. (2023). The Abraham Accords and Israel–UAE normalization. *The Royal Institute of International Affairs*, *March*, 39. https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2023-04/2023-03-28-abraham-accords-israel-uae-normalization-vakil-quilliam-1.pdf
Yossef, A. (2021). The Regional Impact of the Abraham Accords. *Modern War Institute*, *20*(2), 1–17.
Youvan, D. C. (2024). *The Influence of AIPAC on U.S. Political Dynamics: A Historical and Contemporary Analysis*. *July*. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25862.59207
Zanotti, J. (2015). *Israel : Background and U . S . Relations*.